

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam menghadapi arus globalisasi seperti sekarang ini, upaya pembangunan di Dunia Ketiga tidak hanya terfokus pada sektor industri saja tetapi lebih mengarah pada sektor pertanian. Hal tersebut tentunya tidak mengherankan mengingat sebagian besar penduduk di Dunia Ketiga bertumpu pada sektor pertanian hanya dipandang sebagai pelengkap kebutuhan hidup. Pada awalnya sektor pertanian hanya dipandang sebagai pelengkap kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat, yang lebih terfokus pada sektor industri sehingga sektor pertanian terkesan terlupakan. Namun, secara perlahan seiring perkembangannya, pembangunan sektor pertanian kembali mendapat perhatian khusus terutama setelah masuknya komoditi pertanian dalam rejim perdagangan internasional. Hal ini didasarkan hampir 70% penduduk dunia termiskin berada diwilayah pedesaan yang kehidupan pokoknya bersumber dari sektor pertanian sub-sistem.

Secara tradisional peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang sebagai penunjang ekonomi semata, tetapi dalam perkembangan serta kemajuan teknologi, pada sektor pertanian secara perlahan mampu bersaing dengan sektor lainnya, dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Indonesia sebagai salah satu negara agraris yang selama beberapa tahun terakhir telah melupakan sektor pertanian kembali membuka diri terhadap sektor pertanian yang dianggap mampu meningkatkan perekonomian yang saat ini sedang

terpuruk baik domestik maupun internasional. Dalam konteks Indonesia secara keseluruhan, jika pembangunan dimaksudkan untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat, maka pelaksanaannya harus ditekankan pada wilayah pedesaan, lebih khusus lagi rakyat yang bergulat pada kegiatan pertanian. Ada beberapa alasan untuk menjelaskan hal tersebut: (i) sektor pertanian merupakan penyediaan bahan baku bagi sektor industri, (ii) sektor pertanian merupakan salah satu kontributor komoditas ekspor yang cukup penting bagi Indonesia, dan (iii) sektor pertanian merupakan penyedia lapangan kerja bagi tenaga kerja di wilayah pedesaan, disamping fakta bahwa *endowment factor* Indonesia adalah sektor pertanian.

Sejak komoditi pertanian masuk dalam agenda pembahasan organisasi perdagangan internasional (WTO), Indonesia kembali membuka diri terhadap pengembangan sektor pertanian dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian domestik maupun internasional. Pada perkembangannya, dalam putaran Uruguay 1986, GATT telah memasukkan sektor pertanian sebagai agenda utama dalam pembahasan perundingan. Hal ini tidak terlepas dari upaya WTO dalam meliberalisasikan perdagangan produk pertanian. Upaya liberalisasi terhadap perdagangan produk pertanian tidak mendapat respon positif dari negara-negara anggota. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan mendasar terhadap sektor pertanian terutama dalam akses pasar, subsidi ekspor dan bantuan domestik, yang diberlakukan oleh sebagian besar negara maju. Berbagai subsidi diberlakukan bagi negara anggota, terutama negara-negara berkembang yang sebagian besar kemampuan ekonominya bertumpu pada sektor

pertanian. Kondisi ini dipertegas lagi oleh keinginan negara-negara maju dengan adanya penurunan tarif impor maupun tarif ekspor terhadap produk pertanian yang hendak diperdagangkan. Indonesia sebagai negara yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian secara tegas menolak usulan dari negara-negara maju. Secara ekonomis kebijakan itu akan merugikan negara-negara berkembang terutama Indonesia yang pada prinsipnya akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi maupun politik domestik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penulisan ini berjudul : “STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI LIBERALISASI PERDAGANGAN SEKTOR PERTANIAN DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATIONS (WTO).”

B. Latar Belakang Masalah

Disadari atau tidak bahwa Perdagangan Internasional telah memberi sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan ekonomi negara. Esensi dari Perdagangan Internasional itu tidak didasarkan pada seberapa besar keuntungan atau surplus tetapi berdasarkan pada manfaat serta fungsi dari sistem Perdagangan Internasional. Pada awalnya perdagangan internasional dinilai mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, namun saat ini tidak lagi mampu mengakomodasikan kepentingan negara-negara berkembang. Sistem yang ada lebih cenderung berpihak pada kepentingan negara-negara maju, serta tidak didasarkan atas kepentingan ekonomi semata tetapi rentan dengan nuansa politik

diantara negara-negara anggota. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antar negara berkembang dengan negara maju, salah satu bentuk dari kesenjangan tersebut terletak pada jenis komoditi maupun peranannya, dimana proses perdagangan lebih didominasi oleh negara-negara maju. Komoditi primer negara maju lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor komoditi primer negara-negara berkembang. Pada tahun 1990, nilai tersebut mencapai \$463 milyar dalam tahun yang sama, nilai ekspor tersebut akan menjadi separo lebih kecil bila ekspor minyak tidak dimasukkan. Kondisi ini hanya mencapai \$133 milyar untuk negara berkembang. Sementara untuk negara maju, angka tersebut turun mencapai \$359 milyar¹.

Sektor Pertanian bukan hanya terdiri dari tanaman pangan saja tetapi meliputi tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, dan peternakan. Dilihat dari table 1.1 tersebut dapat kita ketahui bahwa setelah adanya rejim AoA nilai ekspor ada beberapa sektor pertanian tidak mengalami peningkatan, melainkan justru secara agrerat cenderung merosot tajam. Sebagai contohnya ekspor beras anjlok dari US\$ 210 juta menjadi hanya tinggal US\$ 3 juta.

¹ Syam Ma'arif, "Strategi Baru Bisnis Internasional: Ketidakadilan Sistem Perdagangan Internasional", Prisma, No.7, Tahun XXII.1993, hal.6.

**Table 1.1 Nilai Impor dan Ekspor Beberapa Komoditas Sektor
Pertanian Indonesia Sebelum (1984-1994) dan Setelah (1995-2000) Rejim
AoA (dalam US\$)**

No.	Komoditas	Tahun	Nilai Import	Nilai Ekspor
1.	Tanaman Pangan (Beras)	1984-1994	648.018.000	216.010.000
		1995-2000	4.268.200.000	3.264.000
2.	Tanaman Perkebunan (Tebu/Gula)	1984-1994	646.063.000	613.000
		1995-2000	2.311.474.000	10.169.000
3.	Tanaman Hortilkultura (Pisang)	1984-1994	41.000	10.038.000
		1995-2000	528.000	66.737.000
4.	Peternakan (Daging Ayam)	1984-1994	6.887.000	6.955.000
		1995-2000	17.900.000	12.002.000

Sumber: Bonnie Setiawan, 2003

Ketidakadilan dari sistem perdagangan internasional semakin terlihat jelas dalam aturan dibawah GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), yang didasarkan pada prinsip pasar bebas, maupun konsep sistem persaingan dibawah WTO (*World Trade Organization*). Inti dari konsep tersebut

beranggapan bahwa semua negara anggota sama-sama kuat untuk bersaing satu sama lain. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena di dunia terdapat negara kaya dan negara miskin. Pada prinsipnya liberalisasi perdagangan internasional diantisipasi akan mampu menimbulkan proses rasionalisasi industri dan alokasi sumber-sumber ekonomi optimal. Liberalisasi perdagangan akan mampu mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh dalam memperluas produksi untuk ekspor. Namun, pada kenyataannya bahwa sistem perdagangan yang diatur sedemikian rupa ternyata telah merugikan negara-negara produsen bahan mentah, dimana produk-produk yang cocok dengan *factor-endowment* yang ada dalam negara-negara ini akan memperoleh manfaat yang optimal melalui perdagangan yang tidak simetris (*asymmetrical system of trade*) sebagai akibat permintaan terhadap produk-produk primer yang menjadi spesialisasi produksi negara-negara berkembang. Kondisi ini akhirnya akan membuka pasar bagi mereka (negara-negara berkembang) sebagai impor produk dari negara maju, yang akhirnya berdampak serius pada kondisi perekonomian dan politik negara-negara berkembang.

Disisi lain masuknya komoditi sektor pertanian dalam agenda pembahasan WTO dianggap sebuah keuntungan oleh sebagian negara-negara berkembang, hal ini karena komoditi sektor pertanian merupakan komoditi unggulan (*leading*). Putaran Uruguay, dibawah sistem GATT semakin memperjelaskan mandat dari sistem perdagangan yang dibangun setelah Perang Dunia II yang telah memaksa negara anggota terutama negara-negara berkembang

dalam meliberalisasi sektor pertaniannya. Persoalan mendasar yang dihadapi negara anggota dalam forum WTO yaitu didasarkan pada tarif dan penghapusan berbagai subsidi menjadi inti permasalahan antara anggota dalam forum WTO. Tarif dan penghapusan berbagai subsidi menjadi inti permasalahan antara negara maju dengan negara berkembang terlebih pada akses pasar (*market acces*) penurunan dan penghapusan semua bentuk subsidi ekspor (*export subsidies*) dan subsidi domestik (*domestic supports*) yang dianggap penyebab distorsi perdagangan. Sebagai perbandingan dari persoalan tarif adalah laporan publikasi pada September 2003, memperlihatkan negara-negara miskin harus membayar pajak lebih tinggi dari pada yang dibayarkan negara maju. Negara Amerika misalnya mengenakan tarif pajak antara 0-1% terhadap barang-barang yang diimpor dari Bangladesh, Kamboja dan Nepal pihak Amerika mengenakan tarif pajak antara 14-15%². Serta pemberlakuan subsidi oleh Uni Eropa dan pemerintah Amerika Serikat bekerjasama dengan Farm Bill yang disahkan Mei 2002 dengan nilai US\$180 milyar sebagai tambahan subsidi sector pertanian hingga 10 tahun kedepan, padahal berdasarkan data pada akhir putaran Uruguay (1997) AS masih menyisakan subsidi ekspor US\$ 594 juta, Uni Eropa sebesar US\$ 849,6 juta, Austria sebesar US\$ 790 juta, Polandia mencapai US\$ 493 juta, dan Kanada sebesar 363 juta³.

² Chepi J. Malik, "Analisi, Industri dan Perdagangan: WTO dan Dominasi Negara Maju", <http://www.sinarharapan.co.id>, Download:10/09/2003.

³ "Tantangan Berat Pertanian Indonesia di Kofrensi WTO Cancun", <http://www.sinarharapan.co.id>, Download:10/09/2003.

Dengan adanya pemberlakuan berbagai subsidi yang saat ini masih diberlakukan oleh sebagian besar negara maju tentu akan menyulitkan negara-negara berkembang tidak mampu bersaing dengan produk pertanian negara-negara maju. Secara singkat dan sederhana tujuh kategori utama sebagai berikut⁴:

1. Standar hidup relatif rendah, sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kurang memadainya pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan.
2. Tingkat produktivitas yang rendah.
3. Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi.
4. Angka pengangguran, terbuka maupun terselubung, yang sangat tinggi, dan akan terus bertambah tinggi, sementara penyediaan lapangan kerja semakin terbatas.
5. Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan mentah).
6. Pasarnya tidak sempurna, dan informasi yang tersedia pun terbatas.
7. Dominasi, ketergantungan dan kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional.

Sejarah perdagangan Indonesia dalam dasawarsa 80-90an selalu mengalami surplus atau mengalami kenaikan yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia namun secara global perdagangan Indonesia belum

⁴ Michael P. Todaro, "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", edisi 7, hal. 51.

menjadi sorotan (*leading*) dunia internasional. Posisi Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya hampir sama dan tidak memiliki pengaruh dalam menentukan politik kebijakan perdagangan global. Dalam sejarah tercatat bahwa dalam perdagangan internasional, akhirnya berkembang upaya-upaya untuk mendapatkan monopoli, baik dalam pemasaran maupun dalam penguasaan bahan-bahan mentah dari negara-negara yang kini disebut sebagai dunia ketiga, yaitu bagian dari masyarakat dunia yang tidak ikut serta sebagai pelaku dalam proses pembentukan sistem dunia (*world system*), yaitu sistem kapitalis global⁵.

Indonesia sebagai negara berpendapatan rendah di Asia bersama negara-negara miskin di Afrika dan kawasan Laut Tengah akan mengalami kemerosotan ekonomi sebagai akibat liberalisasi perdagangan internasional dan adanya hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh blok-blok perdagangan di Eropa Barat dan Amerika Utara disamping terus meningkatnya impor dan pembayaran jasa-jasa ke luar negeri⁶.

Kehadiran blok-blok perdagangan dapat dilihat sebagai ancaman terhadap perekonomian, apabila tata perdagangan internasional kini lebih cenderung proteksionis dan persaingan pasar semakin tajam. Orientasi pertumbuhan perekonomian melalui sektor pertanian pada hakekatnya dinilai oleh para pengamat ekonomi serta pemerintah dianggap hal yang wajar. Mengingat hampir 70% penduduk Indonesia berhubungan dengan sektor pertanian. Sebab sektor pertanian dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga

⁵ M. Dawam Raharjo, "Etika Menghadapi Globalisasi dalam PJP II", Prisma2, Februari 1995, hal.28.

⁶ Sritua Arief, "Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat Indonesia", hal.165.

mampu sebagai penyumbang devisa negara yang cukup berarti dalam upaya peningkatan perekonomian domestik.

Jika dilihat peranan sektor pertanian dalam perkembangan pembangunan nasional selama ini terutama sejak dilaksanakannya pembangunan secara berencana yang dimulai dari Repelita I sampai Repelita V, terlihat terjadi proses perubahan pada struktur ekonomi Indonesia, yaitu peranan sektor pertanian semakin menurun dan peranan sektor industri semakin meningkat terhadap produk domestik Bruto⁷.

Di awal REPELITA I perdagangan melalui sektor pertanian dinilai cukup menjanjikan, dengan melihat data yang ada pada masa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), sektor pertanian mendominasi pendapatan nasional sekitar 49% atau rata-rata 44%. Tetapi pada repelita berikutnya mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan perkembangan sektor pertanian juga diikuti oleh sektor industri yang jauh lebih baik, sehingga sektor pertanian seolah dikesampingkan.

Selain persoalan tersebut Indonesia juga harus menghadapi masalah tentang bagaimana komoditi pertanian Indonesia mampu bersaing dengan komoditi pertanian negara lainnya. Pertanian Indonesia dengan segala keterbatasan yang miliki akhirnya tidak kompetitif dipasaran internasional. Disamping alasan diatas faktor eksternal turut mempengaruhi pertanian Indonesia, seperti penggunaan berbagai subsidi oleh sejumlah besar negara maju. Ditengah

⁷ J. Soedrajad Djiwandono, "perdagangan dan Pembangunan: Tantangan, Peluang dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia", LP3ES, Jakarta, 1992, hal.210.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan: **“Bagaimanakah upaya/strategi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan sektor pertanian kerangka WTO (*World Trade Organization*)”**.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam membahas permasalahan diatas penulis menggunakan teori serta konsep dalam teori pilihan publik (*Public Choice Theory*), menegaskan bahwa politik itu benar-benar penting. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari fenomena pembangunan yang lebih umum dan luas yang secara strategis dipengaruhi oleh institusi-institusi dari perilaku politik⁸.

Teori diatas juga didukung oleh Spero yang mengatakan bahwa poliitik dan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena sumber-sumber ekonomi sangat menentukan strategi dan kekuatan diplomatik untuk mencapai tujuan nasional. Ada tiga hal dimana faktor-faktor politik menentukan hasil dari kebijakan ekonomi yaitu: pertama, sistem politik menentukan sistem ekonomi sebagai struktur dan operasi dari sistim politik internasional. Kedua, faktor-faktor politik sering kali ditentukan oleh kepentingan politik. Ketiga, hubungan ekonomi internasional dalam hubungan politik sebagai interaksi ekonomi internasional dan interaksi politik yang merupakan suatu proses dimana antar state dan non state

⁸ Jan-Erik Lane, Svante Ersson, "Ekonomi Politik Komparatif: Negara atau Pasar di Dunia", hal.275

menunjukkan kemampuannya dalam mengatur serta menyelesaikan konflik-konflik yang mereka hadapi untuk mencapai tujuan yang diinginkan⁹.

Suatu sistem inter perekonomian dimana yang berlaku adalah persaingan prestasi, sedangkan pemerintah hanya ikut campur seminimal mungkin, karena perekonomian itu dituntun oleh harga-harga di pasar bebas seolah-olah "dikendalikan oleh tangan yang tidak terlihat" (Adam Smith), yang akhirnya akan menjadi suatu keseimbangan.¹⁰

Kerangka pemikiran diatas tampaknya cukup mewakili dalam menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Sejarah serta pengalaman perdagangan Indonesia di masa lampau akan menjadi hal yang sangat berharga terlebih dalam upaya peningkatan perekonomian Indonesia melalui sektor pertanian, mengingat kondisi Indonesia hampir 70% penduduknya berhubungan dengan sektor pertanian akan memaksa pemerintah melalui kebijakannya, terutama dalam menghadapi liberalisasi perdagangan produk pertanian secara global.

Dengan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan instrument kebijakan atau (kebijakan pemerintah dengan sendirinya dengan bebas akan berjalan sewajarnya). Disamping, mutu dari suatu ekonomi pasar selanjutnya tergantung dari terciptanya pasar yang sempurna, pasar-pasar tanpa

⁹ Alfaruiqy, M. Furqan dan Soehi M., "Relevansi Ekonomi Pasar Sosial bagi Indonesia", Hal.3

¹⁰ Ibid, hal.3.

adanya kesenjangan kekuasaan, yang dicerminkan oleh monopoli atau oligopoli, sehingga harga-harga tercipta oleh penawaran dan permintaan secara bebas.¹¹

Seperti negara berkembang lainnya beserta Indonesia sektor pertanian menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan perekonomian domestik maupun internasional.

Konsep peran negara dalam *developmental state* sangatlah menentukan dalam menentukan kebijakan, artinya peningkatan ekonomi bukan semata-mata karena logika akumulasi modal kapital dan pasar bebas namun dimotori oleh kemampuan Negara pembangunan *developmental state* dalam merespon perubahan domestik dan regional untuk melakukan kebijakan pembangunan ekonomi (*industrialisasi*).

Seperti yang dijelaskan oleh Grindle, memandang penghilangan kapasitas Negara ini akan menjadi kontra produktif dan berimplikasi negatif. Lebih jauh Grindle menjelaskan bahwa pada saat negara dalam krisis, kapasitas negara sangat diperlukan bagi elit yang berkuasa untuk memobilisasi dukungan bagi strategi pembangunan nasional dan meredefinisi hubungan kekuasaan dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Kapasitas negara dalam hal ini adalah kapasitas negara dalam bidang institusioanal, teknik administratif dan politik. Kapasitas negara dalam bidang institusional adalah kemampuan negara untuk membangun seperangkat aturan yang memandu interaksi ekonomi dan politik

¹¹ Alfaruiqy, M. Furqan dan Soehi, M., *Op.Cit*, hal.4.

untuk menjamin tercapainya tujuan nasional, tegaknya hukum atau tegaknya normal dan perilaku politik yang dipatuhi juga oleh sekelompok sub nasional.¹²

Prinsipnya bahwa peran negara dalam peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya yang ada sangatlah penting, dimana negara berperan aktif sebagai penyeimbang melalui kebijakan-kebijakannya. Sebab disadari atau tidak perdagangan internasional yang terjadi adalah persaingan antar negara. Menurut konsep keunggulan kompetitif negara yang dikemukakan oleh Michael Porter dalam "*The Competitive Advantage of Nations*", menyatakan bahwa ada empat atribut yang menentukan kesuksesan dalam persaingan internasional. Keempat atribut itu adalah¹³:

1. Kondisi faktorial, yaitu posisi suatu negara dalam faktor-faktor produksi (misalnya, tenaga kerja terampil, infrastruktur, teknologi)
2. Kondisi permintaan, yakni sifat permintaan domestik atas produk atau jasa industri tertentu.
3. Keberadaan industri terkait dan industri pendukung yang kompetitif secara internasional.
4. Strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, yakni kondisi dalam negeri yang menentukan perusahaan-perusahaan dibentuk, diorganisasi dan dikelola, serta sifat persaingan domestik.

¹² Merille A Grindle, *Challenging the State : Crises and Inovation in Latin America and Afrika*, Cambridge UP, 1996, Aryanta Nugraha, Seminar, Ekonomi Politik, developmental State : masihkah diperlukan

¹³ Teguh Budiarto, Fandi Ciptono, *pemasaran Internasional*, edisi pertama, hal.29

Pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal serta melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang tertentu jauh akan lebih efisien dan menguntungkan. Terlebih setelah masuknya komoditi pertanian dalam perbahasan lembaga organisasi perdagangan internasional dibawah GATT dalam putaran Uruguay pada tahun 1986 serta organisasi pengantinya WTO yang sehingga saat ini masih menjadi pembahasan utama dalam forum GATT/WTO. Selanjutnya agar produk-produk itu dapat diterima dan diperdagangkan secara bebas, tentu menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Oleh karena itu dengan memberikan pasar bebas (*free markets*) hadir dan beroperasi secara penuh, pelaksanaan swastanisasi perusahaan milik pemerintah. Promosi perdagangan bebas dan pengembangan ekspor, menarik para investasi asing (misalnya investasi dari negara-negara maju) serta pembatasan regulasi dan distorsi harga pasar input, pasar output meupun pasar keuangan, maka menurut para tokoh neokonservatif tersebut efisiensi serta pertumbuhan ekonomi akan terpacu secara lebih global¹⁴.

Pada prinsipnya pemerintah dan pasar sama-sama bisa digunakan di semua negara untuk menghasilkan berbagai barang dan tidak hanya barang publik pengelolanya bisa diserahkan pada mekanisme pasar, atau kepada instrument kebijakan (sektor pemerintah). Peluang suatu negara untuk memilih menjadi besar jika ia telah mencapai tingkat modernitas tertentu dan mempunyai kapasitas tertentu¹⁵.

¹⁴ Michael P. Todaro, Op Cit, hal.114.

¹⁵ Jan-Erik Lane, Svante Ersson, "Ekonomi Politik Komparatif: Negara atau Pasar di Dunia", hal.243.

Dalam proses pemilihan pasar sasaran, dimulai dengan segmentasi pasar, teknik membagi dan mengelompokkan setiap negara dalam kelompok-kelompok homogen. Setiap negara memiliki karakteristik yang relatif sama dalam hal daya tanggapnya terhadap berbagai aspek strategi pemasaran. Proses segmentasi yang terdiri atas¹⁶:

1. Mengembangkan taksonomi pasar untuk mengklasifikasikan pasar dunia.
2. Mengelompokkan semua negara kedalam kelompok-kelompok homogen yang memiliki karakteristik yang sama, sesuai dengan kriteria atau dimensi yang digunakan dalam taksonomi pasar.
3. Menentukan metode yang secara teoritis paling efisien untuk melayani masing-masing kelompok/segmen.
4. Memilih kelompok yang memiliki kesesuaian paling tinggi antara kemampuan perusahaan (produk, jasa, kekuatan) dan persyaratan kelompok yang bersangkutan.
5. Menyesuaikan klasifikasi ideal diatas dengan hambatan yang dijumpai dalam nyata (hambatan hukum, politik dan budaya).

Namun, sejauh mana dampak yang ditimbulkan perdagangan melalui sektor pertanian mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran pemerintah sangatlah sentral, sebab disadari atau tidak bahwa perdagangan bebas baik secara lembut ataupun cepat akan membawa dampak pada liberalisasi

¹⁶ Teguh Budiarto, Fandi Ciptono, Ibid, Hal. 108.

politik. Mengingat antara upaya peningkatan ekonomi dan kondisi politik domestik adalah dua situasi yang paling berkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan. Peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan sumberdaya alam tentu tidak terlepas dari situasi politik yang kondusif.

E. Hipotesa

Strategi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi adalah :

1. Strategi Eksternal

Strategi yang lebih ditekankan pada tujuan untuk memperbaiki mutu dari produk-produk pertanian sebelum diekspor, dalam kata lain merupakan strategi yang lebih bersifat keluar.

a. Melaksanakan *Konsep Strategy Product (SP)*

Strategi untuk memilih produk-produk pertanian tertentu yang memang dianggap penting dan produk-produk pertanian tersebut dibuat dalam rangka untuk ketahanan pangannya.

b. Melaksanakan Konsep *Special Safeguards Mechanism (SSM)*

Strategi ini berguna sebagai mekanisme perlindungan yang diberlakukan bagi produk-produk pertanian yang memang telah dipilih oleh masing-masing negara.

c. Penetapan Rencana Induk Pengembangan Ekspor Produk Pertanian

Mewujudkan Kesamaan focus pengembangan Ekspor pada komoditi atau jenis produk yang disepakati secara nasional dan harus didukung oleh "*Political Will*" yang kuat.

d. Instrumen Pengendalian Impor Melalui Tarrif Rate Quota (TRQ)

Strategi ini digunakan untuk mengendalikan arus impor yang sangat deras dalam pasar domestic.

2. Strategi Internal (Domestik)

Strategi ini dibuat khusus untuk membentuk program-program yang berupa rancangan dari pemerintah guna untuk meningkatkan pembangunan pertanian.

F. Metode Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah dengan riset kepustakaan (*library research*). Data-data tersebut yang merupakan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar dan situs internet yang berhubungan dengan masalah liberalisasi.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah dengan metode kualifikasi dengan mempelajari data-data yang diperlukan. Data merupakan data sekunder dan selanjutnya disusun serta dianalisis sesuai dengan topik permasalahan diatas.

G. Tujuan Penelitian

Mengetahui tentang upaya atau strategi Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam menghadapi kebijakan WTO mengenai liberalisasi

perdagangan produk pertanian disamping mengetahui lebih jauh kondisi ataupun situasi produk pertanian dipasaran internasional terutama produk pertanian Indonesia serta mengetahui hambatan-hambatan yang membatasi perdagangan internasional khususnya perdagangan produk pertanian yang merupakan produk unggulan dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian hanya dibatasi pada masalah yang sedang dibahas yaitu liberalisasi perdagangan sektor pertanian terutama setelah dimasukkannya sektor pertanian dalam pembahasan Organisasi Perdagangan Dunia dibawah GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) tahun 1986-1994 tetapi penulis hanya membatasi atau akan mengambil data pada liberalisasi perdagangan setelah terjadinya perjanjian AoA pada putaran Uruguay dari tahun 1995-2003. Pembahasan terhadap aturan perdagangan sektor pertanian tetap menjadi pembahasan dalam forum WTO, selama aturan perdagangan yang diberlakukan tidak adil.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistem penulisan dimana disini akan dijelaskan point-point apa saja dalam penulisan

BAB I: Merupakan Pendahuluan yang memuat Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Merupakan Liberalisasi Perdagangan Produk Pertanian Dalam WTO yang berisi tentang, Liberalisasi Perdagangan meliputi definisi dan liberalisasi perdagangan dalam sektor pertanian, dan berisi tentang GATT/WTO meliputi GATT, WTO, Prinsip-Prinsip Dasar GATT/WTO, Ketentuan Perdagangan Sektor Pertanian Dalam GATT dan Ketentuan Tentang Perdagangan Sektor Pertanian Pasca Terbentuknya.

BAB III: Merupakan Perdagangan Pertanian di Indonesia yang berisi tentang, Kondisi Pertanian Indonesia meliputi, Hambatan Pertanian Indonesia, Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia, Ekspor-Impor Produk Pertanian Pasca Krisis, Perkembangan Ekspor dan Impor Produk Pertanian dan Perkembangan Ekspor-Impor Produk Segar dan Olahan.

BAB IV: Berisi tentang Strategi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi Perdagangan Sektor Pertanian meliputi, Strategi Eksternal berisi SP (Strategi Product) dan SSM (Special Safeguard Mechanism), dan Penempatan Rencana Induk Pengembangan Ekspor Produksi Pertanian, Instrumen Pengendalian Impor Melalui Tarrif Rate Quota (TRQ) serta Strategi Internal.

Bab V : Kesimpulan